

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN INTERNAL DOSEN
Progam Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**STRATEGI KOLABORASI OPEN GOVERNMENT DALAM TATA
KELOLA PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN
BOJONEGORO**

Tim Peneliti:

Esa Septian, S.A.P., MPA
Septi Wulandari, S.Sos., M.A.P
Dian Tita Islamiyah
Kholili Maidatul Jannah

Dibiayai oleh:

Universitas Bojonegoro

Periode 1 Tahun Anggaran 2025/2026

Nomor Kontrak:

018/LPPM-LIT/ UB / XI / 2025

UNIVERSITAS BOJONEGORO

2026

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN AKHIR PENELITIAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

1. **Judul Penelitian** : Strategi Kolaborasi *Open Government* Dalam Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro
2. **Ketua Peneliti**
 - a. Nama Peneliti : Esa Septian, S.A.P., MPA
 - b. NIDN : 0727119701
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - d. E-mail : esaseptian28@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Administrasi Publik
3. **Anggota Peneliti 1**
 - a. Nama (Dosen) : Septi Wulandari, S.Sos., M.A.P
 - b. NIDN : 0709099901
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - d. E-mail : septiwuland09@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Administrasi Publik
4. **Anggota Peneliti 2**
 - a. Nama (Mahasiswa) : Dian Tita Islmaiyah
 - b. NIM : 3632011035
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - d. E-mail : titadian20@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Administrasi Publik
5. **Anggota Peneliti 3**
 - a. Nama (Mahasiswa) : Kholili Maidatul Jannah
 - b. NIM : 2363201165
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - d. E-mail : kholilijannah18@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Administrasi Publik
5. Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan
6. Lokasi Penelitian : Universitas Bojonegoro
7. Dana Diusulkan : 3.000.000

Mengetahui,
Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Bojonegoro, 23 Februari 2026
Pengusul,

Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc.
NIDN 07 2108 8601

Esa Septian, S.A.P., MPA
NIDN. 0727119701

KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat, limpahan, dan karunia-Nya. Tak lupa shalawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi akhir zaman Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini penulis dapat menyelesaikan laporan akhir penelitian internal dosen universitas bojonegoro. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih besar bagi bidang keilmuan sosial dan politik. Adapun judul penelitian ini “Strategi Kolaborasi *Open Government* Dalam Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Bojoegoro”. Terimakasih saya ucapkan kepada LPPM yang telah memfasilitasi penelitian ini semoga dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Praktis.....	9
1.4.2 Manfaat Teoritis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.2 Penelitian Terdahulu	12
2.3 Kerangka Konsep Penelitian	14
BAB III METODE PENELITIAN	15
3.1 Jenis Penelitian.....	15
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	15
3.3 Teknik Analisis Data.....	16
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	18
4.1 Kolaborasi: Penguatan Kerja Sama Antara Lembaga dan Pemangku Kepentingan.....	18
4.2 Transparansi: Keterbukaan Informasi dan Pengambilan Keputusan	20
4.3 Partisipasi: Mendorong Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan	26
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	29
5.1 Kesimpulan	29
5.2 Saran.....	30
DAFTAR PUSTAKA	32
LAMPIRAN	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2 Efforts to improve communication effectiveness	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Overlay Vizualitation	7
Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir	14
Gambar 3. Keterbukaan Informasi dan Pengambilan Keputusan	21
Gambar 4. Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan	27

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran transparansi informasi dan komunikasi efektif dalam mendukung tata kelola pariwisata berkelanjutan berbasis prinsip *open government* di Kabupaten Bojonegoro. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, penelitian ini menggali penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun upaya penerapan *open government* telah dilakukan, masih terdapat tantangan seperti koordinasi antarlembaga yang belum optimal, partisipasi masyarakat yang terbatas, dan pemanfaatan media digital yang belum maksimal. Melalui model kolaborasi *Pentahelix* yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media, penelitian ini merekomendasikan strategi penguatan kolaborasi lintas-sektor untuk mewujudkan tata kelola pariwisata yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro. Untuk luaran wajib yang diharapkan dalam penelitian ini adalah publikasi berupa jurnal ilmiah nasional terakreditasi SINTA 2 pada Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) URL: <https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transparansi informasi dan komunikasi yang efektif merupakan komponen penting dari sektor publik, khususnya dalam pengembangan pariwisata. Di Kabupaten Bojonegoro, komunikasi yang optimal di dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sangat penting untuk mencapai tata kelola yang berkelanjutan, karena komunikasi tersebut mendorong saling pengertian dan memperkuat hubungan antar pemangku kepentingan. (Romadona & Setiawan, 2020). Kompleksitas transparansi informasi membutuhkan pendekatan komunikasi yang dinamis untuk memastikan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Transparansi informasi publik, yang difasilitasi melalui perangkat seperti situs web, sangat penting untuk memenuhi hak publik atas informasi, sehingga meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. (Kurniawam, 2021). Lebih jauh lagi, transparansi berfungsi sebagai dasar bagi tata kelola pemerintahan yang baik, yang menjamin pengelolaan sumber daya publik yang bertanggung jawab (Syeh dkk., 2022). Tuntutan akan transparansi, yang ditegaskan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, semakin menegaskan pentingnya pengelolaan informasi yang transparan dan partisipatif. (Sasmita dan Rahaju, 2023) Oleh karena itu, kolaborasi efektif yang didorong oleh transparansi memperkuat pengelolaan dan tata kelola destinasi wisata yang berkelanjutan.

Transparansi informasi sektor publik memainkan peran penting dalam meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas organisasi publik terhadap tantangan eksternal, seperti dinamika pasar dan perubahan kebijakan (Anderson dkk., 2017). Dalam konteks tata kelola pariwisata, komunikasi yang efektif antar unit organisasi sangat penting karena memungkinkan respons yang cepat dan tepat terhadap perubahan kondisi dan tantangan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak dapat dicapai secara optimal tanpa kolaborasi antar pemangku kepentingan, yang memperluas dampak kebijakan dan praktik pengembangan

destinasi.(Musa dkk., 2024). Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri pariwisata, dan masyarakat lokal, berkontribusi pada tata kelola pariwisata berkelanjutan dan memungkinkan sektor ini untuk mengatasi tantangan.(Derizal dkk., 2024; Perkins & Khoo-Lattimore, 2020; Septian dkk., 2024). Selain itu, menumbuhkan pemahaman bersama di berbagai bagian organisasi dapat mengurangi potensi kesalahpahaman dan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan(Kongres, 2021). Melalui kolaborasi dan komunikasi yang intensif, sektor pariwisata dapat meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mendorong keberhasilan dan keberlanjutan tata kelola pariwisata daerah. Oleh karena itu, transparansi informasi dan kolaborasi yang efektif sangat penting untuk mengoptimalkan kerja sama antarlembaga, yang pada akhirnya akan menghasilkan dampak positif bagi pembangunan pariwisata.

Pariwisata sedang mengalami tren positif di kalangan wisatawan yang mencari pengalaman liburan seru dan unik melalui desa wisata. Pengelolaan desa wisata di Indonesia merupakan bagian dari program pembangunan pariwisata berkelanjutan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan pariwisata dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional(Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021). Kabupaten Bojonegoro, sebagai daerah yang berkomitmen pada pengembangan pariwisata, termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD). Dari 74 Daya Tarik Wisata (DTWK) yang dimilikinya, 32 di antaranya termasuk dalam kategori daya tarik wisata yang sedang berkembang. Pada tahun 2022, jumlah desa wisata di Kabupaten Bojonegoro tercatat sebanyak 32 desa yang terdaftar dalam aplikasi Desa Wisata Nusantara, menjadikannya kabupaten dengan jumlah desa wisata terbanyak di Jawa Timur.(Afifah, 2022).

Perkembangan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, jumlah wisatawan relatif rendah, hanya 315.173 wisatawan. Angka ini meningkat signifikan pada tahun 2021, mencapai 2.377.878 wisatawan, mencerminkan

pemulihan aktivitas pariwisata. Pada tahun 2022, jumlah tersebut melonjak drastis menjadi 12.572.000 wisatawan, yang mungkin mengindikasikan pengaruh suatu peristiwa besar atau kebangkitan pariwisata yang kuat. Namun, setelah puncaknya, jumlah tersebut menurun tajam pada tahun 2023 menjadi sekitar 1.171.180, dengan proyeksi untuk tahun 2024 menunjukkan penurunan lebih lanjut menjadi 296.053 wisatawan. Tren penurunan ini menunjukkan tantangan dalam mempertahankan momentum pariwisata, yang mungkin disebabkan oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi atau perubahan perilaku perjalanan. Secara keseluruhan, meskipun sektor pariwisata di Bojonegoro mengalami volatilitas yang signifikan, pola ini menyoroti kerentanannya terhadap guncangan eksternal dan menggarisbawahi perlunya fokus strategis pada pembangunan berkelanjutan. (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, 2024).

Secara teoritis, open government menyediakan kerangka kerja untuk mengatasi masalah-masalah ini melalui tiga pilar utama: transparansi, partisipasi, dan kolaborasi. (Gasco, 2015; Obama, 2009; Wirtz dkk., 2015) Berbagai penelitian menekankan bahwa meskipun konsep ini menjanjikan, implementasinya menghadapi tantangan yang signifikan dalam konteks birokrasi lokal (Dawes & Helbig, 2010; Nam, 2012). Perbedaan persepsi antara publik dan pemerintah mengenai Pemerintahan Terbuka, serta kesenjangan dalam strategi penyebaran informasi, menyoroti perlunya pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual. Penelitian empiris tentang penerapan open government dalam tata kelola pariwisata di tingkat lokal masih terbatas, terutama di Indonesia. Tantangan demokrasi dan efektivitas kolaborasi multi-pemangku kepentingan merupakan aspek krusial yang seringkali terabaikan. (Clarke & Francoli, 2014; Harrison dkk., 2011) Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji peran transparansi informasi dan komunikasi efektif dalam mendukung tata kelola kolaboratif berbasis Open Government dalam tata kelola pariwisata budaya lokal di Bojonegoro. Dengan demikian, penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi kesenjangan empiris dengan memberikan rekomendasi strategis guna memperkuat keberlanjutan pariwisata daerah. (Erdayani et al., 2023).

Studi ini mengeksplorasi lebih lanjut tantangan penerapan transparansi informasi di sektor publik dan mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan akuntabilitas dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan. Meskipun wacana tentang Pemerintahan Terbuka terus berkembang, investigasi lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana integrasi transparansi, kolaborasi, dan partisipasi berkontribusi dalam membangun ekosistem pariwisata berkelanjutan. Di Kabupaten Bojonegoro, penerapan prinsip-prinsip Pemerintahan Terbuka diharapkan dapat mendorong lingkungan transparan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat akuntabilitas, dan memajukan pembangunan berkelanjutan melalui tata kelola kolaboratif (Brahmana dan Sitepu, 2020). Dengan kekayaan alam dan budayanya, Bojonegoro memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata unggulan, di mana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berperan penting dalam menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian budaya.

Komunikasi yang efektif di dalam organisasi, khususnya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, berperan penting dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata. Penyebaran informasi yang jelas dan berkala antar staf internal menjadi fondasi koordinasi yang baik, sementara komunikasi eksternal dengan masyarakat lokal, pelaku usaha, dan pemerintah daerah sangat penting untuk membangun dukungan yang substansial. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengembangan pariwisata tidak hanya meningkatkan kesadaran akan destinasi wisata, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan mereka terhadap warisan budaya di daerah mereka. (Anwar dkk., 2023; Kualaria dkk., 2022) Sumber daya lokal, seperti tradisi dan aset budaya, harus dipromosikan melalui kolaborasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk penggunaan teknologi digital untuk mendekatkan informasi kepada masyarakat. (Al-Fahmi dkk., 2023; Ramadhani & Mijiarto, 2024) Peran media digital dalam memperluas jangkauan komunikasi tidak dapat diabaikan. Dengan memanfaatkan platform media sosial, situs web resmi, dan aplikasi pariwisata, informasi mengenai potensi pariwisata di Kabupaten Bojonegoro dapat diakses oleh beragam khalayak, sehingga meningkatkan keterlibatan publik dalam

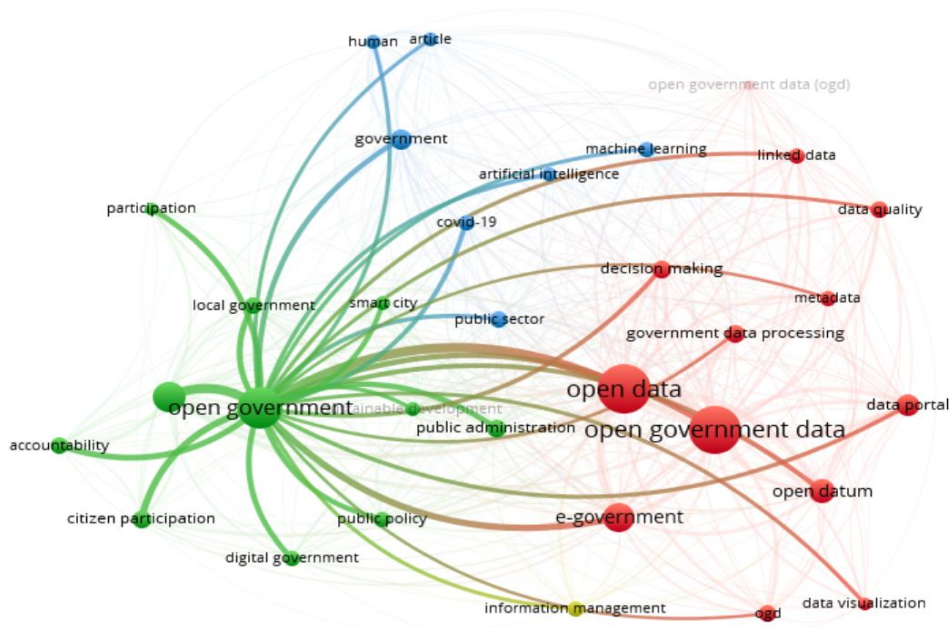
kegiatan pariwisata.(Abdillah & Andrea, 2024; Ramadhani & Mijiarto, 2024)Teknologi informasi ini memberikan peluang untuk mempercepat distribusi informasi dan memfasilitasi interaksi antara pelaku usaha, pengunjung, dan masyarakat lokal. Selain itu, metode pengembangan partisipatif, seperti yang diterapkan dalam kegiatan wisata desa, dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi wilayah dan masyarakatnya.(Binahayati Rusyidi, 2018)Oleh karena itu, pengelolaan yang inklusif dan partisipatif akan menjadi kunci penguatan sektor pariwisata di Kabupaten Bojonegoro.

Untuk mencapai tujuan yang lebih strategis, komunikasi internal di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro perlu diintegrasikan dengan komunikasi antarsektor seperti pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif. Kolaborasi antar instansi pemerintah, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan swasta sangat penting untuk memajukan tata kelola pariwisata berkelanjutan. Keberlanjutan dalam pembangunan pariwisata berkaitan erat dengan konsep kolaborasi Pentahelix, yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, komunitas, dan media (Chamidah dkk., 2020; Mardiatmi dkk., 2023). Bekerja sama untuk menciptakan tata kelola pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam wawasan tentang dinamika interaksi antar aktor Pentahelix dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan, menyoroti peran para aktor kunci ini dalam menciptakan tata kelola pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan (Hardianto dkk., 2019; Subair dkk., 2025). Pentingnya kolaborasi dan kemitraan dalam mendukung inisiatif pengembangan pariwisata, dengan contoh-contoh keberhasilan inisiatif multipihak yang menghasilkan praktik-praktik keberlanjutan inovatif di pulau-pulau dan desa-desa wisata.(Graci, 2013; Noviana dkk., 2025)Selain itu, tinjauan pustaka tentang kolaborasi dan kemitraan dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan menetapkan agenda penelitian tentang peran kolaborasi dalam pariwisata berkelanjutan, menyediakan kumpulan pengetahuan yang solid selama bertahun-tahun.(Guia, 2018).

Kerangka kerja Pentahelix berfungsi sebagai model komprehensif untuk membentuk strategi manajemen pariwisata yang efektif, berkelanjutan, dan inklusif. Model ini menekankan integrasi berbagai kepentingan untuk mendorong

praktik pariwisata yang bertanggung jawab dan dapat menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lebih lanjut, kolaborasi mendorong identitas budaya lokal dengan melibatkan anggota masyarakat secara aktif dalam pengembangan produk dan layanan budaya, yang tidak hanya mencerminkan karakteristik daerah tetapi juga meningkatkan daya tarik pasar mereka, baik secara lokal maupun internasional. Pada akhirnya, hal ini menciptakan peluang ekonomi baru di bidang pariwisata yang dapat mendiversifikasi ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan.(Yuniarti dkk., 2024).

Praktik open government juga memainkan peran penting dalam mempercepat pengelolaan pariwisata dengan meningkatkan transparansi dan mendorong partisipasi pemangku kepentingan. Dengan memanfaatkan inisiatif data terbuka, pemerintah dapat memfasilitasi pengambilan keputusan yang terinformasi dan membangun kepercayaan di antara masyarakat lokal.(Khomsani, 2022)Transparansi ini memungkinkan koordinasi yang lebih baik di antara berbagai pemangku kepentingan, sehingga meningkatkan tata kelola pariwisata. Dinamika tata kelola yang kooperatif ini dapat memberdayakan masyarakat lokal, memastikan kepentingan dan masukan mereka dipertimbangkan dalam kebijakan terkait pariwisata (Prasetyanti & Nugroho, 2019). Selain itu, membangun komunikasi dan hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan lokal dapat meningkatkan ketahanan masyarakat di daerah tujuan wisata.(Gao & Yu, 2020)Dengan mempromosikan suasana kolaboratif yang didasarkan pada prinsip-prinsip open government, daerah dapat menyusun strategi pariwisata berkelanjutan yang selaras dengan aspirasi dan identitas lokal sekaligus mendorong peluang ekonomi(Keyim, 2018). Kontribusi studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam manajemen pariwisata, sekaligus memberikan dampak positif yang memperkaya pengalaman wisatawan dan memberdayakan masyarakat setempat.



Gambar 1. Overlay Visualization

Sumber: Vosviewer, 2025

Analisis "open government ", "kolaborasi", dan "tata kelola pariwisata berkelanjutan" dalam konteks jaringan visualisasi overlay menunjukkan kurangnya interkoneksi antar simpul dalam beberapa tahun terakhir. Terlepas dari pentingnya topik-topik ini, pemetaan menunjukkan ketiadaan kontinuitas yang nyata dalam penelitian yang secara langsung berkaitan dengan persinggungan tema-tema ini. Meskipun tata kelola telah menjadi fokus studi, terdapat kekurangan upaya kolaboratif atau sinergi yang mencolok antara bidang-bidang penelitian ini dalam literatur terbaru. Hal ini menyoroti kesenjangan penelitian yang signifikan, yang menunjukkan peluang untuk eksplorasi yang lebih mendalam tentang hubungan antara " open government " dan "tata kelola pariwisata berkelanjutan", terutama dalam hal kolaborasi antar pemangku kepentingan utama.

Lebih lanjut, analisis temporal menunjukkan bahwa "open government" mendapatkan perhatian akademis yang signifikan pada tahun 2020, dengan peningkatan publikasi yang signifikan selama periode tersebut. Lonjakan ini menggarisbawahi munculnya hal baru dalam penelitian seputar integrasi prinsip-prinsip open government ke dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan. Sebagaimana diamati oleh (Donthu dkk., 2021) dan (Verma dkk., 2021)Tren ini

mencerminkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya memasukkan konsep "open government" ke dalam kebijakan pengembangan pariwisata. Mengingat wawasan ini, studi-studi mendatang perlu mengkaji lebih lanjut keterkaitan antara ketiga dimensi ini dan implikasinya yang lebih luas terhadap pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro menuntut adanya tata kelola yang transparan, partisipatif, dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Namun, penerapan prinsip *open government* dalam tata kelola pariwisata daerah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait keterbukaan informasi publik, koordinasi antarinstansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Permasalahan utama yang muncul adalah sejauh mana prinsip-prinsip *open government* telah diimplementasikan dalam pengelolaan destinasi wisata di Bojonegoro serta bagaimana efektivitas komunikasi dan transparansi informasi berperan dalam mendukung tata kelola tersebut.

Selain itu, kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan masih memerlukan penguatan. Model kolaborasi yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, komunitas, dan media (Pentahelix) seringkali belum berjalan secara optimal akibat perbedaan kepentingan, kurangnya koordinasi, serta minimnya integrasi antar sektor. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pola kolaborasi antar aktor tersebut terbentuk, bagaimana dinamika hubungan yang terjadi di antara mereka, dan sejauh mana kolaborasi tersebut berkontribusi terhadap pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan mendasar: (1) bagaimana penerapan prinsip *open government* dalam tata kelola pariwisata di Kabupaten Bojonegoro; (2) bagaimana bentuk kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pariwisata berkelanjutan; (3) apa saja tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan tata kelola pariwisata yang terbuka

dan partisipatif; serta (4) strategi apa yang dapat dikembangkan untuk memperkuat kolaborasi berbasis *open government* guna meningkatkan efektivitas dan **keberlanjutan tata kelola pariwisata di Kabupaten Bojonegoro**.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip *open government* dalam tata kelola pariwisata di Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengidentifikasi bentuk dan pola kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.
3. Untuk mengetahui berbagai tantangan dan hambatan dalam implementasi *open government* pada sektor pariwisata daerah.
4. Untuk merumuskan strategi kolaboratif yang efektif dalam mendukung tata kelola pariwisata berkelanjutan berbasis prinsip *open government* di Kabupaten Bojonegoro

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dalam merumuskan kebijakan pengelolaan pariwisata yang lebih transparan, partisipatif, dan kolaboratif. Rekomendasi strategis yang dihasilkan dapat membantu pemerintah dalam memperkuat koordinasi antar instansi, meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal, serta memperluas sinergi dengan pihak swasta dan akademisi melalui model kolaborasi *Pentahelix*.
2. Bagi masyarakat dan pelaku usaha pariwisata, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kolaborasi dan keterbukaan dalam pengelolaan destinasi wisata. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan program dan kegiatan yang mendorong

peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi wisata secara berkelanjutan.

3. Bagi lembaga pendidikan seperti Universitas Bojonegoro, penelitian ini dapat menjadi referensi pembelajaran dan inspirasi bagi penelitian lanjutan dalam bidang administrasi publik dan pembangunan daerah.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian tata kelola pemerintahan dan pariwisata berkelanjutan berbasis *open government*. Penelitian ini memperkaya khazanah teori mengenai integrasi prinsip transparansi, partisipasi, dan kolaborasi dalam konteks pembangunan daerah. Dengan mengaitkan konsep *open government* dan model kolaborasi *Pentahelix*, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam menjelaskan bagaimana sinergi antaraktor publik dan nonpublik membentuk tata kelola pariwisata yang lebih adaptif dan inklusif.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan landasan empiris bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus pada pengelolaan sektor publik berbasis kolaborasi dan keterbukaan informasi. Melalui temuan lapangan dan analisis data yang dihasilkan, diharapkan penelitian ini mampu mengisi kesenjangan literatur tentang penerapan prinsip *open government* dalam tata kelola pariwisata di tingkat daerah, khususnya pada konteks pemerintahan lokal seperti Kabupaten Bojonegoro.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Open Government

Open Government atau pemerintahan terbuka merupakan paradigma tata kelola yang menekankan tiga prinsip utama, yaitu transparansi, partisipasi, dan kolaborasi (Gasco, 2015). Melalui prinsip ini, pemerintah berupaya membuka akses informasi kepada masyarakat, melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan, serta memperkuat kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Konsep ini diperkuat oleh inisiatif global *Open Government Partnership (OGP)* yang menekankan pentingnya inovasi dalam keterbukaan data publik, akuntabilitas, dan pelayanan publik berbasis kolaborasi (Wirtz et al., 2015). Di Indonesia, implementasi prinsip *open government* diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberikan hak bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dari lembaga pemerintahan.

Menurut (Alamsyah et al., 2020), penerapan prinsip pemerintahan terbuka dapat mempercepat pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven policy*) dan meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Dengan demikian, *open government* bukan hanya tentang keterbukaan informasi, tetapi juga strategi memperkuat kolaborasi lintas-sektor dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan partisipatif.

2.1.2 Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan

Tata kelola pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism governance*) merupakan pendekatan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dalam pengelolaan destinasi wisata. Prinsip utamanya mencakup pelestarian sumber daya alam, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pemerataan manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata.

Menurut (Fathani et al., 2023), tata kelola pariwisata yang berkelanjutan harus bersifat inklusif dan partisipatif dengan memperhatikan kolaborasi antar aktor pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan media. Governance model yang baik akan memastikan bahwa pembangunan pariwisata tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menjaga kelestarian ekologi dan warisan budaya.

2.1.3 Kolaborasi dan Model Pentahelix

Model *Pentahelix* menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam sektor pariwisata, harus melibatkan lima unsur utama (Chamidah dkk., 2020; Mardiatmi dkk., 2023), yakni:

1. Pemerintah (*government*)
2. Akademisi (*academia*)
3. Pelaku bisnis (*business*)
4. Komunitas (*community*)
5. Media (*media*)

Pendekatan *Pentahelix* memperkuat efektivitas kebijakan dan mendorong sinergi antaraktor dalam merancang program pariwisata yang inovatif dan inklusif. Dalam konteks tata kelola pariwisata daerah, model ini memfasilitasi terciptanya kolaborasi yang saling menguntungkan antar pemangku kepentingan. Menurut (Wahyudin et al., 2024), penerapan kolaborasi *Pentahelix* dapat memperkuat koordinasi lintas-sektor, meningkatkan transparansi, dan mempercepat transformasi digital di sektor pariwisata. Kolaborasi ini menjadi dasar penting untuk mewujudkan tata kelola pariwisata yang terbuka, inovatif, dan berkelanjutan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

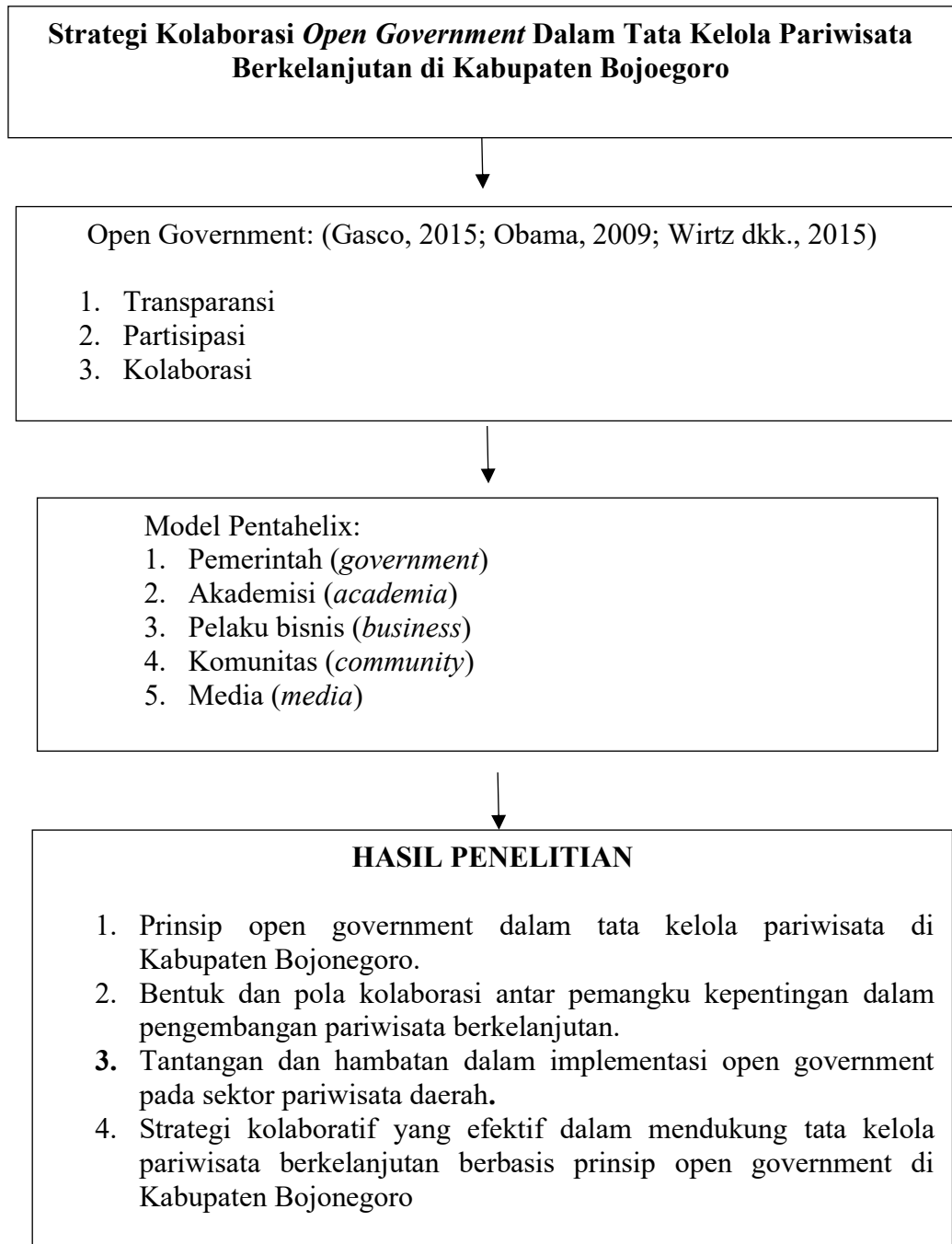
No.	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel atau Instrumen	Hasil Penelitian
1.	Mulyani, S. (2021). Collaborative	Kualitatif (Studi	Kolaborasi antaraktor	Kolaborasi antarpemangku

	Governance on Ecotourism: Towards Sustainable Tourism Development in Magelang Regency, Central Java.	Kasus)	(pemerintah, masyarakat, swasta), tata kelola pariwisata, partisipasi masyarakat	kepentingan berperan penting dalam meningkatkan efektivitas tata kelola ekowisata dan mendukung keberlanjutan pariwisata daerah.
2.	Zaenuri, M. (2021). Collaboration Governance in the Development of Natural Attractions.	Kualitatif (Deskriptif)	Kolaborasi pemerintahan daerah, komunitas lokal, dan sektor swasta	Menunjukkan bahwa kolaborasi antaraktor dalam pengelolaan daya tarik wisata alam meningkatkan efisiensi kebijakan dan memperkuat daya saing destinasi lokal.
3.	Hajar, S., Wahyudi, H., Arma, N.A., & Kholik, K. (2024). Tourism Policy Based on Good Tourism Governance in Realizing Sustainable Tourism in the Lake Toba Tourism Area, North Sumatera.	Kualitatif (Analisis Kebijakan)	Prinsip good governance: transparansi, partisipasi, akuntabilitas	Prinsip good tourism governance dapat memperkuat keberlanjutan destinasi pariwisata dengan melibatkan berbagai aktor dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik.
4.	Wahyudin, C., Firliandoko, R., Amalia, N., & Zulfa, A.A. (2024). Collaborative-Based Tourism Governance Model in Sustainable Tourism Development.	Kualitatif (Model Konseptual)	Model tata kelola kolaboratif, peran Pentahelix, penguatan kapasitas lembaga	Menghasilkan model tata kelola pariwisata berbasis kolaborasi yang menekankan sinergi antar unsur Pentahelix untuk mencapai pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah (2025)

2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir



Sumber: Hasil pengolahan (2025)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam (*in-depth understanding*) terhadap fenomena sosial yang kompleks, khususnya praktik komunikasi dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro. Menurut (Creswell, 2016), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pandangan, serta pengalaman partisipan secara komprehensif dalam konteks alami mereka.

Metode studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi secara detail bagaimana komunikasi internal dan eksternal dalam lembaga tersebut berperan dalam mendukung prinsip *open government* yang meliputi kolaborasi, transparansi, dan partisipasi. Melalui desain ini, peneliti dapat menelaah dinamika sosial dan praktik komunikasi antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan pariwisata.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama (human instrument) yang secara langsung berinteraksi dengan partisipan dan lingkungan penelitian. Peran ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan data secara reflektif, menyesuaikan arah penelitian dengan kondisi lapangan, serta memastikan bahwa hasil analisis benar-benar mencerminkan realitas sosial yang diteliti (Bradshaw et al., 2017; Kim et al., 2017).

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara Semi-Terstruktur

Wawancara dilakukan menggunakan panduan pertanyaan terbuka untuk memperoleh informasi mendalam mengenai praktik komunikasi, koordinasi,

dan kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang dianggap paling relevan dan berkompeten terhadap isu yang diteliti. Informan meliputi pejabat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, pelaku usaha pariwisata lokal, serta anggota masyarakat yang aktif dalam kegiatan pariwisata. Kriteria pemilihan informan didasarkan pada peran, tanggung jawab, dan pengalaman praktis mereka dalam tata kelola pariwisata. Proses wawancara berlanjut hingga mencapai titik jenuh data (data saturation), yaitu ketika tidak ada tema baru yang muncul dari hasil wawancara berikutnya.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung interaksi dan proses komunikasi dalam kegiatan koordinasi publik, rapat pariwisata, serta aktivitas promosi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan, melainkan berperan sebagai pengamat untuk mencatat dinamika komunikasi dan kolaborasi yang terjadi secara alami.

3. Dokumentasi

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan dokumen-dokumen pendukung seperti laporan kegiatan, kebijakan pariwisata daerah, serta konten media sosial resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro. Penggunaan media digital relevan karena lembaga ini aktif memanfaatkan platform daring untuk komunikasi, pengambilan keputusan, serta koordinasi lintas-stakeholder. Data digital tersebut memberikan konteks autentik mengenai pola komunikasi terbuka dan partisipatif di lingkungan dinas.

3.3 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik (thematic analysis) yang bersifat interaktif dan berulang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data lapangan dan mengaitkannya dengan fokus penelitian.

Mengacu pada model analisis interaktif dari (Miles et al., 2014) proses analisis dilakukan melalui tiga tahap utama:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, dikodekan, dan dikategorikan berdasarkan tema-tema yang relevan dengan prinsip *open government*—yakni transparansi, kolaborasi, dan partisipasi.

2. Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah direduksi kemudian disusun ke dalam bentuk narasi tematik, tabel, dan matriks untuk memudahkan pemahaman hubungan antar konsep. Penyajian ini membantu peneliti dalam melihat pola komunikasi dan bentuk kolaborasi yang terjadi antar pemangku kepentingan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Tahap terakhir melibatkan interpretasi makna dari tema-tema yang muncul untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti menafsirkan hasil temuan dengan membandingkannya pada teori dan hasil penelitian terdahulu guna memperoleh pemahaman mendalam tentang praktik komunikasi terbuka dan perannya dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro.

Proses analisis ini bersifat iteratif, artinya dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian berlangsung. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya menggambarkan kondisi empiris, tetapi juga menghasilkan insight teoretis dan praktis tentang bagaimana komunikasi transparan dan penggunaan media digital dapat memperkuat kolaborasi multi-stakeholder dalam sektor pariwisata daerah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kolaborasi: Penguatan Kerja Sama Antara Lembaga dan Pemangku Kepentingan

Kolaborasi yang efektif antara lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan eksternal, seperti sektor swasta dan komunitas lokal, menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro telah membangun jaringan kerja yang solid dengan berbagai pihak melalui pemanfaatan teknologi komunikasi digital, salah satunya WhatsApp, sebagai saluran komunikasi internal. Penggunaan platform digital ini mempercepat alur informasi, memungkinkan koordinasi yang lebih efisien, dan meningkatkan sinergi antar berbagai departemen dalam merancang serta mengimplementasikan program-program pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan WhatsApp tidak hanya mempercepat komunikasi antar anggota internal, tetapi juga meningkatkan transparansi dan kolaborasi dalam pengambilan keputusan, terutama dalam menyelesaikan masalah yang muncul selama implementasi kebijakan. Namun, meskipun teknologi memberikan manfaat signifikan dalam hal efisiensi komunikasi, tantangan terkait keamanan data perlu menjadi perhatian serius. Perlindungan terhadap informasi sensitif, baik terkait data pribadi pegawai maupun informasi strategis, harus dijaga dengan kebijakan yang lebih ketat guna menjaga keberlanjutan komunikasi yang aman dan efektif.

Kendati demikian, efektivitas komunikasi internal di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro masih perlu ditingkatkan. Praktik komunikasi antaranggota dalam organisasi tidak selalu berjalan optimal, terutama dalam hal pemahaman dan distribusi informasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun WhatsApp digunakan sebagai alat komunikasi, beberapa pegawai masih mengaku bahwa mereka kesulitan untuk memahami instruksi dan kebijakan yang disampaikan oleh pimpinan. Hal ini terjadi karena tidak adanya kejelasan dalam alur informasi yang disampaikan, yang mengarah pada ketidaksesuaian antara

rencana dan implementasi di lapangan. Selain itu, keterlibatan pegawai dalam memberikan ide dan pendapat sangat minim karena persepsi bahwa kontribusi mereka tidak akan diterima atau dihargai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk membangun komunikasi yang terbuka, belum ada mekanisme yang cukup untuk memfasilitasi partisipasi aktif seluruh anggota dalam pengambilan keputusan, yang pada akhirnya menghambat keberhasilan implementasi program pariwisata.

Lebih lanjut, kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat lokal menjadi sangat penting dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan inklusif, yang melibatkan berbagai pihak dalam proses penciptaan dan promosi produk pariwisata dan budaya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang terjalin antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan sektor swasta telah menghasilkan berbagai produk pariwisata yang lebih beragam dan inovatif, seperti festival budaya dan paket wisata yang mengangkat kearifan lokal. Melalui kemitraan dengan sektor swasta, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro dapat memanfaatkan sumber daya dan keahlian yang lebih luas dalam merancang program yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat nilai-nilai budaya lokal, menciptakan rasa memiliki dan kebanggaan terhadap warisan budaya yang ada. Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengembangan pariwisata dapat memperkuat identitas budaya daerah dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya.

Namun, meskipun terdapat kolaborasi yang kuat antara berbagai sektor, tantangan yang terkait dengan koordinasi lintas sektoral dan keberagaman kepentingan masih perlu diatasi. Keberhasilan kolaborasi dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif sangat bergantung pada pengelolaan hubungan antarinstansi dan pemangku kepentingan yang efektif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kolaborasi yang baik, koordinasi antara instansi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal terkadang terhambat

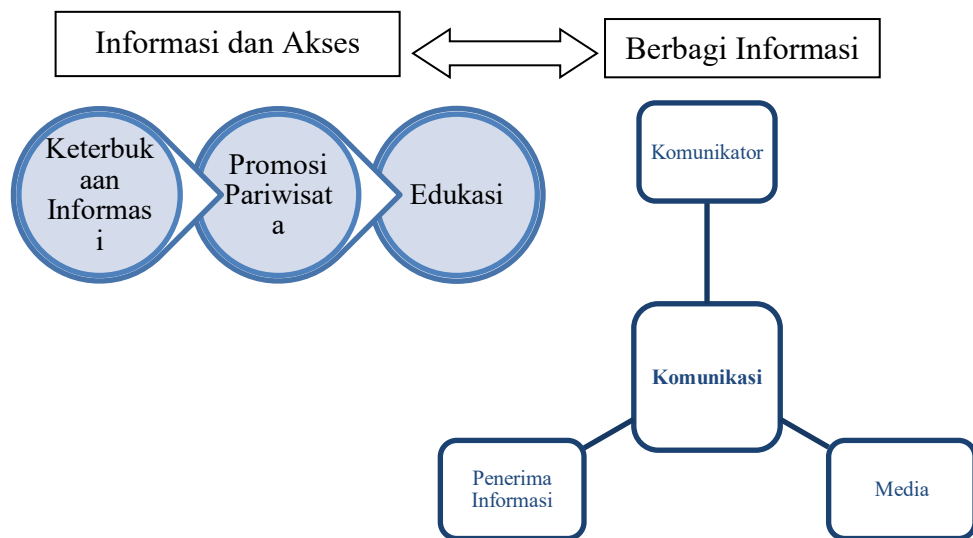
oleh perbedaan tujuan dan prioritas masing-masing pihak. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro perlu memperkuat mekanisme koordinasi antar pihak terkait, serta mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Pendekatan ini akan memastikan bahwa tujuan pembangunan pariwisata dan pelestarian budaya dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan, serta menghasilkan dampak positif bagi masyarakat lokal.

4.2 Transparansi: Keterbukaan Informasi dan Pengambilan Keputusan

Penerapan prinsip transparansi dalam Open Government di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro terbukti efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penggunaan media sosial dan platform komunikasi lainnya telah memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi terkait kebijakan dan program pariwisata secara lebih langsung dan jelas. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya saluran komunikasi yang terbuka, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengakses informasi terkait perkembangan kebijakan pariwisata dengan lebih mudah. Hal ini meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan serta memberikan masyarakat hak untuk mengetahui dan terlibat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan yang berhubungan dengan sektor pariwisata dan budaya. Lebih lanjut, penggunaan media digital juga mempercepat distribusi informasi dan memastikan bahwa data yang disampaikan selalu up-to-date dan dapat diakses kapan saja oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Rapat rutin dan forum terbuka yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro juga memainkan peran penting dalam menciptakan iklim transparansi yang lebih inklusif. Forum ini tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga menyediakan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan mengajukan pertanyaan, yang memperkuat interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Temuan ini menyatakan bahwa transparansi dalam kebijakan publik dapat meningkatkan partisipasi

masyarakat dan memperkuat hubungan kepercayaan antara pemerintah dan warga. Secara keseluruhan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro tidak hanya berperan sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai fasilitator dialog yang membangun, menciptakan komunikasi dua arah yang memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata dan pelestarian budaya.



Gambar 3. Keterbukaan Informasi dan Pengambilan Keputusan
 Sumber: Penulis, 2025

Penerapan prinsip transparansi dalam komunikasi organisasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro telah menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait sektor pariwisata. Penggunaan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial dan portal informasi, memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi secara langsung dan jelas mengenai kebijakan, program, dan perencanaan yang dilakukan oleh dinas. Hal ini memperkuat transparansi dalam pengelolaan sektor pariwisata dan memberikan masyarakat hak untuk mengetahui perkembangan terkini dari kebijakan yang berhubungan dengan sektor tersebut. Selain itu, penggunaan media sosial juga berfungsi sebagai sarana interaktif untuk menjalin komunikasi dua arah antara

pemerintah dan masyarakat, sehingga menciptakan saluran dialog yang lebih terbuka.

Forum terbuka dan rapat rutin yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga menjadi bagian integral dari penerapan transparansi dalam pengambilan keputusan. Forum ini tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan atau program, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan, mengajukan pertanyaan, dan berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan. Dengan cara ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupaya menciptakan iklim komunikasi yang inklusif dan kolaboratif, yang memungkinkan masyarakat untuk turut serta dalam menentukan arah pengembangan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro. Temuan ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa transparansi dalam kebijakan publik dapat meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga.

Selain itu, transparansi dalam komunikasi juga mencakup keterbukaan informasi mengenai keberhasilan atau tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak hanya memberikan informasi tentang kebijakan baru, tetapi juga secara terbuka mengungkapkan hasil evaluasi dan umpan balik yang diperoleh dari masyarakat dan wisatawan. Melalui pendekatan ini, dinas dapat mengidentifikasi area yang perlu perbaikan serta merancang strategi lebih baik di masa depan. Keterbukaan semacam ini meningkatkan kepercayaan publik dan membangun hubungan yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat, serta memberi kesempatan bagi pihak terkait untuk berkontribusi dalam upaya pengembangan pariwisata yang lebih berkelanjutan.

Komunikasi vertikal dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro menunjukkan pola yang terstruktur, dengan komunikasi turun dilakukan oleh kepala seksi bersama kepala bidang dan kepala sub-bidang, sedangkan komunikasi naik dilakukan oleh staf untuk melaporkan hasil lapangan atau menyampaikan keluhan terkait pekerjaan atau masalah pribadi. Penggunaan media komunikasi, terutama WhatsApp, mempermudah alur informasi dan

memungkinkan diskusi lebih cepat, meskipun penerapannya masih terbatas pada waktu-waktu tertentu seperti rapat atau saat ada masalah yang mendesak. Salah satu bentuk komunikasi yang signifikan adalah rapat umum yang melibatkan seluruh anggota organisasi, di mana masing-masing bidang mempresentasikan perkembangan dan kesiapan mereka terkait pengembangan pariwisata. Meskipun demikian, pelaksanaan komunikasi vertikal ini belum sepenuhnya optimal, mengingat kurangnya konsistensi dalam frekuensi komunikasi yang dilakukan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro telah berhasil menciptakan budaya komunikasi yang terbuka dan kekeluargaan, yang mendukung terciptanya suasana kerja yang harmonis dan saling mendukung di antara anggota organisasi. Struktur organisasi yang jelas, bersama dengan penggunaan teknologi seperti WhatsApp, meningkatkan efisiensi komunikasi internal dan memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap kebutuhan mendesak. Selain itu, rapat bulanan dan mingguan memperkuat koordinasi di antara berbagai bidang, memastikan bahwa program pariwisata dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini menyeimbangkan kebutuhan perencanaan jangka panjang dengan respons terhadap situasi yang berkembang, mendukung keberhasilan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro.

Mengingat keberhasilan lembaga dalam membangun budaya komunikasi yang efektif, hal ini berkaitan dengan pencapaian tujuan pembangunan pariwisata.

Table 2. Efforts to improve communication effectiveness

No.	Efforts to improve communication effectiveness	Description
1.	Mendorong Penggunaan Media Sosial	Mengarahkan departemen untuk lebih aktif memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi merupakan langkah yang positif. Pemanfaatan platform seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram dapat mempercepat

		penyampaian informasi, memperbaiki interaksi dengan masyarakat, dan meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan. Langkah ini mendukung tren global yang menunjukkan pentingnya media sosial dalam menyebarkan informasi dan berkomunikasi dengan audiens yang lebih luas..
2.	Organizational Communication Training	Memberikan pelatihan komunikasi organisasi kepada anggota merupakan investasi yang signifikan. Pelatihan ini dapat mencakup keterampilan komunikasi interpersonal, manajemen konflik, serta pemanfaatan alat komunikasi modern dengan efektif. Dengan meningkatkan keterampilan komunikasi di semua level, departemen dapat memastikan bahwa pesan dan informasi disampaikan secara jelas dan dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak terkait.
3.	Conditional meeting frequency increase	Menambah frekuensi rapat menjadi lebih sering, seperti rapat mingguan, adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan respons terhadap perubahan yang mendesak. Dengan rapat yang lebih sering, departemen akan lebih cepat merespons masalah yang muncul dan memastikan koordinasi yang lebih baik di antara berbagai bidang. Hal ini sejalan dengan prinsip manajemen yang menekankan pentingnya adaptasi dan responsif terhadap dinamika yang terjadi di lingkungan kerja..

Source: processed by authors, 2025

Keberhasilan lembaga dalam membangun budaya komunikasi yang efektif berhubungan erat dengan pencapaian tujuan pembangunan pariwisata. Komunikasi yang baik tidak hanya memastikan keselarasan dengan visi jangka panjang, tetapi juga memfasilitasi koordinasi antara tim pemasaran, pemangku kepentingan komunitas, dan mitra bisnis untuk promosi pariwisata. Selain itu, pelestarian budaya dan pendidikan publik memerlukan komunikasi yang jelas untuk memperoleh dukungan dari masyarakat luas, menjaga nilai-nilai budaya, dan meningkatkan pemahaman dari wisatawan. Penggunaan teknologi, seperti WhatsApp, juga telah meningkatkan efisiensi komunikasi, meskipun tantangan terkait keamanan data dan kebutuhan untuk pelatihan teknologi lebih lanjut tetap perlu diperhatikan.

Untuk mencapai keberlanjutan dalam pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya, keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan dan masyarakat sangat penting. Komunikasi yang terbuka dengan pemerintah lokal, komunitas, dan sektor bisnis melalui forum publik dan lokakarya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat serta mendukung kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, sektor ekonomi kreatif memerlukan komunikasi yang mendorong inovasi dan kolaborasi antara pelaku industri. Komunikasi yang efektif dapat memotivasi perubahan positif, menciptakan peluang baru, dan mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

1. Mengembangkan Program Pelatihan Lanjutan: Selain pelatihan komunikasi organisasi, pertimbangkan untuk mengembangkan program pelatihan lanjutan yang mencakup aspek seperti kepemimpinan, manajemen proyek, dan pemecahan masalah.
2. Mengukur dan Mengevaluasi Efektivitas Komunikasi: Penting untuk memiliki sistem pengukuran dan evaluasi yang secara teratur memantau efektivitas komunikasi organisasi. Umpan balik dari anggota, pemangku kepentingan, dan masyarakat dapat digunakan untuk menilai apakah komunikasi organisasi berjalan dengan baik atau apakah perlu ada perubahan dan perbaikan.

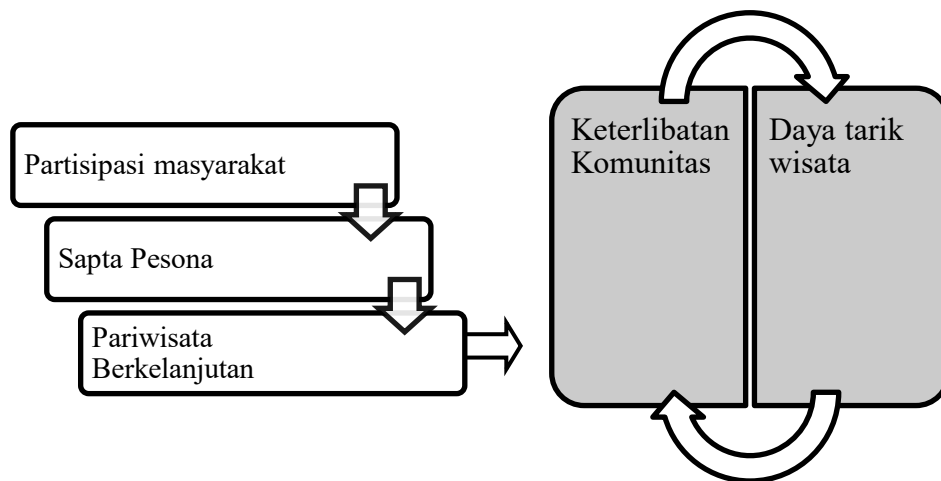
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro telah berhasil membangun budaya komunikasi yang terbuka dan terorganisir, yang berkontribusi signifikan terhadap pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya. Dengan memanfaatkan teknologi, struktur rapat yang terorganisir, dan keterlibatan pihak eksternal, lembaga ini terus berupaya meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi. Saran untuk meningkatkan komunikasi lebih lanjut mencakup pemanfaatan media sosial, pelatihan komunikasi, dan peningkatan frekuensi rapat. Melalui pendekatan ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro dapat memperkuat sektor pariwisata dan melestarikan budaya lokal, menjadikannya contoh bagi daerah lain dalam mencapai pembangunan pariwisata berkelanjutan dan melibatkan masyarakat dalam pelestarian warisan budaya.

4.3 Partisipasi: Mendorong Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan

Salah satu aspek penting dari Open Government adalah Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro telah berhasil mengintegrasikan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada pelibatan masyarakat dalam forum publik atau rapat terbuka, tetapi juga dalam mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi kreatif yang berbasis pada budaya lokal.

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan produk budaya dan pariwisata menjadi salah satu contoh nyata dari partisipasi aktif dalam pembangunan pariwisata. Dengan melibatkan pelaku industri lokal dan komunitas dalam merancang produk wisata dan budaya, pemerintah daerah tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga memastikan bahwa produk yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai lokal dan dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini juga menciptakan rasa memiliki terhadap program-program pemerintah dan meningkatkan dukungan terhadap kebijakan yang diambil.

Pengembangan pariwisata yang berorientasi pada masyarakat lokal masih sangat minim. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum memiliki kapasitas finansial yang memadai dan keahlian yang cukup untuk mengembangkan pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjadi tuan rumah yang baik, memberikan layanan sesuai dengan kemampuan mereka, membantu menjaga keamanan, ketertiban, keindahan, dan kebersihan lingkungan, memberikan kenangan dan kesan yang baik bagi wisatawan untuk mendukung program Sapta Pesona:



Gambar 4. Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan

Sumber: Penulis, 2025

Gambar ini menggambarkan hubungan antara partisipasi masyarakat, pariwisata berkelanjutan, dan Sapta Pesona dalam konteks pengembangan daya tarik wisata. Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting yang mendukung tercapainya pariwisata berkelanjutan, yang pada gilirannya akan meningkatkan implementasi Sapta Pesona. Sapta Pesona, yang meliputi unsur-unsur seperti kebersihan, keindahan, keramahan, dan kenyamanan, berperan dalam menarik wisatawan. Keterlibatan komunitas dalam proses ini meningkatkan kualitas daya tarik wisata, menciptakan hubungan timbal balik yang memperkuat keduanya—dengan meningkatnya keterlibatan komunitas yang akan memperkuat daya tarik wisata, dan sebaliknya, daya tarik wisata yang meningkat akan memperkuat

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian pariwisata berkelanjutan.

Pengembangan daya tarik wisata melibatkan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pengelola untuk mengelola dan mengendalikan potensi pariwisata yang ada, dengan tujuan utama untuk meningkatkan daya tarik bagi wisatawan. Proses ini mencakup perencanaan, pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas wisata yang berkelanjutan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan destinasi. Selain itu, pengembangan daya tarik wisata juga berfokus pada peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya pelestarian budaya dan alam, serta peran masyarakat dalam mendukung keberlanjutan sektor pariwisata. Dengan demikian, pengelolaan yang efektif dapat menciptakan pengalaman wisata yang berkualitas dan mendukung keberlanjutan jangka panjang destinasi wisata.

Sebagai contoh, kolaborasi dengan sektor ekonomi kreatif melibatkan pelaku industri lokal yang tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai pihak yang memberi masukan dan inovasi dalam menciptakan produk-produk baru. Dengan demikian, partisipasi masyarakat memperkuat efektivitas kebijakan dan mengurangi kesenjangan antara kebijakan yang diambil dan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pelestarian budaya dapat meningkatkan keberlanjutan dari program tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Celah penelitian ini terisi dengan mengidentifikasi pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku industri lokal, dan masyarakat dalam membangun pariwisata berbasis budaya. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan pariwisata yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan budaya. Implikasi penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip Open Government dapat memperkuat partisipasi masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat efektivitas kebijakan pembangunan pariwisata.

Namun, meskipun penelitian ini berhasil menggambarkan kontribusi partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata, masih ada beberapa aspek yang belum sepenuhnya terjawab, seperti bagaimana kapasitas masyarakat dalam mengelola pariwisata dan faktor penghambat yang masih ada dalam implementasi prinsip Open Government. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih mendalami aspek-aspek tersebut, seperti pengembangan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata dan analisis lebih lanjut tentang tantangan yang dihadapi dalam penerapan Open Government dalam sektor pariwisata. Saran kebijakan yang dapat diberikan adalah memperkuat pelatihan dan kapasitas masyarakat dalam bidang pariwisata serta memperluas akses bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang lebih strategis terkait dengan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat.

Penerapan prinsip Open Government dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Bojonegoro, yang mengindikasikan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan program, dari perencanaan hingga evaluasi, telah berkontribusi pada keberlanjutan sektor pariwisata. Partisipasi masyarakat dalam merancang produk wisata berbasis budaya lokal, serta pengintegrasian sektor ekonomi kreatif, menjadi indikator keberhasilan

dalam memperkuat produk pariwisata yang mencerminkan nilai-nilai lokal dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Dengan demikian, penerapan prinsip *Open Government* terbukti efektif dalam memperkuat partisipasi masyarakat yang pada akhirnya mendorong terciptanya destinasi wisata yang berkelanjutan.

Celah penelitian ini terisi dengan mengidentifikasi pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku industri lokal, dan masyarakat dalam membangun pariwisata berbasis budaya. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan pariwisata yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan budaya. Implikasi penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip *Open Government* dapat memperkuat partisipasi masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat efektivitas kebijakan pembangunan pariwisata. Namun, meskipun penelitian ini berhasil menggambarkan kontribusi partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata, masih ada beberapa aspek yang belum sepenuhnya terjawab, seperti bagaimana kapasitas masyarakat dalam mengelola pariwisata dan faktor penghambat yang masih ada dalam implementasi prinsip *Open Government*.

5.2 Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih mendalami aspek-aspek tersebut, seperti pengembangan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata dan analisis lebih lanjut tentang tantangan yang dihadapi dalam penerapan *Open Government* dalam sektor pariwisata. Fokus ini dapat mencakup pengkajian lebih lanjut tentang bagaimana masyarakat lokal dapat diberdayakan dengan pelatihan dan dukungan sumber daya yang lebih baik untuk mengelola destinasi wisata secara mandiri. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi model-partisipasi yang paling efektif dalam konteks yang berbeda, mengingat tiap daerah memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang unik. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menyoroti dampak kebijakan *Open Government* terhadap pengelolaan pariwisata berkelanjutan, dengan fokus pada bagaimana kolaborasi

antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat menciptakan inovasi dalam pengelolaan destinasi wisata. Hal ini juga bisa melibatkan kajian tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam keputusan kebijakan dapat berkontribusi pada pelestarian budaya dan alam, serta pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. Z., & Andrea, G. A. (2024). Perencanaan Bumi Perkemahan Sebagai Atraksi Daya Tarik Wisata Kampung Samin. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(8), 8063–8068. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i8.5645>
- Afifah. (2022). *Punya 32 Desa Wisata, Bojonegoro Peringkat Pertama se-Jawa Timur*. <https://bojonegorokab.go.id/berita/6393/punya-32-desa-wisata-bojonegoro-peringkat-pertama-se-jawa-timur>
- Al-Fahmi, B. M., Rahmawati, E., & Sagirani, T. (2023). Penerapan K-Means Clustering Pada Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Untuk Mendukung Keputusan Strategi Pemasaran. *Jurnal Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 9(2), 141–149. <https://doi.org/10.25077/teknosi.v9i2.2023.141-149>
- Alamsyah, A., Gustyana, T. T., & Fajaryanto, A. D. (2020). *Technology and Business Management: Technology Based Economic Growth and Government Policy Open Data Analytical Model for Human Development Index Optimization to Support Government Policy*.
- Anderson, W., Busagara, T., Mahangila, D., Minde, M., Olomi, D., & Bahati, V. (2017). The dialogue and advocacy initiatives for reforming the business environment of the tourism and hospitality sector in Tanzania. *Tourism Review*, 72(1), 45–67. <https://doi.org/10.1108/TR-09-2016-0036>
- Anwar, M. S., Wibowo, A., & Kartono, D. T. (2023). *Model dan Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro*. 4(3), 398–408. <https://doi.org/10.32493/dedikasipkm.v4i3>
- Binahayati Rusyidi, M. F. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(1), 144. <https://doi.org/10.24843/jdepar.2017.v05.i01.p26>
- Bradshaw, C., Atkinson, S., & Doody, O. (2017). Employing a Qualitative Description Approach in Health Care Research. *Global Qualitative Nursing Research*, 4. <https://doi.org/10.1177/2333393617742282>
- Brahmana, D. A. B., & Sitepu, E. (2020). Pola Komunikasi Organisasi Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Di Kantor Lurah Gung Leto Kecamatan Kabanjahe. *Social Opinion: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 5(2), 96–104.
- Chamidah, N., Guntoro, B., & Sulastri, E. (2020). *Marketing Communication and Synergy of Pentahelix Strategy on Satisfaction and Sustainable Tourism* *. 7(3), 177–190. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no3.177>
- Clarke, A., & Francoli, M. (2014). What's in a name? A comparison of 'open government' definitions across seven open government partnership members. *EJournal of EDemocracy and Open Government*, 6(3), 248–266. <https://doi.org/10.29379/jedem.v6i3.227>
- Cong, X. (2021). Research on the Tourism Decision-Making Mechanism: A Case Study of American Outbound Tourism. *Informing Science*, 24, 129–146. <https://doi.org/10.28945/4878>
- Creswell, J. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.

- Dawes, S., & Helbig, N. (2010). Dawes & Helbig_Information Strategies for Open Govt.(2010).pdf. *IFIP International Federation for Information Processing*, 50–60.
- Derizal, Rahmanita, M., Oktadiana, H., & Wulan, S. (2024). *Implementation of Regenerative Tourism in Nyarai Tourism Village , Padang Pariaman Regency , West Sumatra , Indonesia*. 07(11), 6819–6829. <https://doi.org/10.47191/jefms/v7>
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro. (2024). *Data Destinasi Wisata*. <https://data.bojonegorokab.go.id/dinas-kebudayaan-dan-pariwisata.html@detail=destinasi-wisata>
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285–296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
- Erdayani, R., Afandi, M., & Afandi, S. A. (2023). Bibliometric Analysis of Open Government: A Study on the Open Government Partnership. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 3(2), 276–294. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v3i2.180>
- Fathani, A. T., Azmi, N. A., & Purnomo, E. P. (2023). *A Systematic Review of Tourism Governance : Sustainable Tourism Governance Model Post COVID-19*. 19(148), 35–50. <https://doi.org/10.24258/jba.v19i1.1125>
- Gao, X., & Yu, J. (2020). Public governance mechanism in the prevention and control of the COVID-19: information, decision-making and execution. *Journal of Chinese Governance*, 5(2), 178–197. <https://doi.org/10.1080/23812346.2020.1744922>
- Gasco, M. (2015). *Special Issue on Open Government : An Introduction*. 33(5), 535–539. <https://doi.org/10.1177/0894439314560676>
- Graci, S. (2013). Collaboration and Partnership Development for Sustainable Tourism. *Tourism Geographies*, 15(1), 25–42. <https://doi.org/10.1080/14616688.2012.675513>
- Guia, J. (2018). Managing Uncertainties in the Governance of Sustainable Tourism Networks. In *Collaboration for Sustainable Tourism Development*. <https://www.goodfellowpublishers.com/academic-publishing.php?content=doi&doi=10.23912/9781911635000-3914>
- Hardianto, W. T., Sumartono, Muluk, M. R. K., & Wijaya, F. (2019). PentaHelix synergy on tourism development in Batu, East Java. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(6), 137–149.
- Harrison, T. M., Guerrero, S., Burke, G. B., Cook, M., Cresswell, A., Helbig, N., Hrdinová, J., & Pardo, T. (2011). Open government and e-government: Democratic challenges from a public value perspective. *ACM International Conference Proceeding Series*, 245–253. <https://doi.org/10.1145/2037556.2037597>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2021). *Membangun Ekosistem Desa Wisata Bersama Komunitas*. <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Membangun-Ekosistem-Desa-Wisata-Bersama-Komunitas>
- Keyim, P. (2018). Tourism Collaborative Governance and Rural Community

- Development in Finland: The Case of Vuonisma. *Journal of Travel Research*, 57(4), 483–494. <https://doi.org/10.1177/0047287517701858>
- Khomsani, M. A. (2022). *The Impacts of Open Government Initiatives to Deal with COVID-19: A Learning from Local Government*. <https://doi.org/10.4108/eai.14-9-2021.2321426>
- Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, C. (2017). Characteristics of Qualitative Descriptive Studies: A Systematic Review. *Research in Nursing and Health*, 40(1), 23–42. <https://doi.org/10.1002/nur.21768>
- Kualaria, S., Wijyantini, B., & Hanafi, I. (2022). Peran Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Potensi Desa Wisata. *National Multidisciplinary Sciences*, 1(1), 20–26. <https://doi.org/10.32528/nms.v1i1.5>
- Kurniawam, H. (2021). Pengembangan Website Sebagai Wujud Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Sintang (Studi kasus: Diskominfo Kabupaten Sintang). *E-Jurnal JUSITI (Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi)*, 10(1), 74–84. <https://doi.org/10.36774/jusiti.v10i1.822>
- Mardiatmi, B. D., Wadu, R. B., & Nopiyanti, A. (2023). *Collaboration with Pentahelix to Improving MSME Management Performance During the Covid-19 Pandemic Access to Success*. 24(194), 135–142. <https://doi.org/10.47750/QAS/24.194.16>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. SAGE Publications Inc.
- Musa, H. G., Fatmawati, I., Nuryakin, N., & Suyanto, M. (2024). Charting the Future Trajectory of Sustainable Tourism Research in Africa. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 13(1), 109–120. <https://doi.org/10.46222/ajhtl.19770720.488>
- Nam, T. (2012). Citizens' attitudes toward Open Government and Government 2.0. *International Review of Administrative Sciences*, 78(2), 346–368. <https://doi.org/10.1177/0020852312438783>
- Noviana, L., Situmorang, M. T. N., Cahyaputri, B., Farida, F., & Sukwika, T. (2025). Analysis of Pentahelix Tourism Village for Ecotourism Development in Batu City, East Java. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 20(3), 1273–1282. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.200332>
- Obama. (2009). *Memorandum on Transparency and Open Government* (pp. 21–22).
- Perkins, R., & Khoo-Lattimore, C. (2020). Friend or foe: Challenges to collaboration success at different lifecycle stages for regional small tourism firms in Australia. *Tourism and Hospitality Research*, 20(2), 184–197. <https://doi.org/10.1177/1467358419836719>
- Prasetyanti, R., & Nugroho, A. A. (2019). *Governance Network in Sustainable Tourism Development: A case of thematic kampung tourism in Malang, Indonesia*. 93(AICoBPA 2018), 184–188. <https://doi.org/10.2991/aicobpa-18.2019.42>
- Ramadhani, F. W. A., & Mijiarto, J. (2024). Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengenalan Kampong Thengul Menggunakan Metode Pelatihan Pembuatan Konten Media Sosial. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(8), 7779–7790. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i8.5618>

- Sasmita, A. N., & Rahaju, T. (2023). Implementasi Open Parliament Pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Publika*, 1723–1734. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n2.p1723-1734>
- Septian, E., Wulandari, S., Suharto, D. G., & Pratama, O. (2024). Challenges in Long-Term Public-Private Partnership: Impacts on Public Resource Utilisation. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 13(4), 726–734. <https://doi.org/10.46222/ajhtl.19770720.558>
- Subair, N., Prianto, A. L., & Amri, A. R. (2025). The Dynamics of No One Left Behind: Contestation of Pentahelix Actors in Sustainable Tourism Governance in the Coastal Area of Tanjung Bunga, Indonesia. In *Grassroots Journal of Natural Resources* (Vol. 8, Issue 1). <https://doi.org/10.33002/nr2581.6853.080101>
- Syeh, F. F., Amir, A. S., & Arya, N. (2022). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Situs Web Pemerintah Daerah Se-Sulawesi Selatan. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 6(2), 209. <https://doi.org/10.24853/pk.6.2.209-218>
- Verma, R., Lobos-Ossandón, V., Merigó, J. M., Cancino, C., & Sienz, J. (2021). Forty years of applied mathematical modelling: A bibliometric study. *Applied Mathematical Modelling*, 89, 1177–1197. <https://doi.org/10.1016/j.apm.2020.07.004>
- Wahyudin, C., Firliandoko, R., Amalia, N., Zulfa, A. A., Studi, P., Publik, A., Djuanda, U., Tol, J., No, C., Barat, J., Cecep, K., & Email, W. (2024). *MODEL TATAKELOLA PARIWISATA BERBASIS KOLABORATIF DALAM COLLABORATIVE BASED TOURISM GOVERNANCE MODEL IN SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga masih kurangnya ketertarikan wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata yang ada di tenjolaya*. 10, 147–164.
- Wirtz, B. W., Birkmeyer, S., Wirtz, B. W., & Birkmeyer, S. (2015). *Open Government : Origin , Development , and Conceptual Perspectives Open Government : Origin , Development , and Conceptual Perspectives*. March, 37–41. <https://doi.org/10.1080/01900692.2014.942735>
- Yuniarti, L., Prasetyo, A., & Lestari, L. (2024). *Developing Collaborative Culture: Cultural Change Through Community Collaboration and Economic Growth* (Vol. 2, Issue Bishss). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-273-6_14

LAMPIRAN



UNIVERSITAS BOJONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

STATUS TERAKREDITASI "B" SK.BAN-PT Nomor : 2764/SK/BAN-PT/IAk-PPJIS/IV/2022, Tanggal 27 April 2022

KANTOR : KAMPUS FISIP UNIGORO Jl. Lettu Suyitno No. 2 Telp. (0353) 885668 PO.BOX. 114 BOJONEGORO

Perihal : 1 (satu) Bendel
Lampiran : Permohonan Pengajuan Dana Penelitian

Kepada:
Yth, Rektor Universitas Bojonegoro
Di_ BOJONEGORO

Menindak lanjuti pengumuman/himbauan yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Suyitno Bojonegoro, bahwa setiap Dosen di Universitas Bojonegoro wajib melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dapat dilaksanakan melalui Hibah Internal Dosen. Maka bersama ini kami mengajukan usulan dana hibah internal dosen dengan keterangan berikut:

Nama Dosen : Esa Septian, S.A.P., MPA.
NIDN : 0727119701
Judul Proposal : Strategi Kolaborasi *Open Government* Dalam Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Bojoegoro

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Bojonegoro, 11 November 2025
Hormat kami,

DR. AHMAD TAUFIQ, S.Hi., M.Si.
NIDN 0705127404

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan.
2. Yth. Ketua LPPM

Menu (10 pt) + Create Sign in

All tools Edit Convert E-Sign Find text or tools Share

African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure 2025, Vol. 14 No. 4 pp. 745-754
ISSN: 2223-814X

Open Government Collaboration Strategies for Sustainable Tourism Governance

Abstract

Esa SEPTIAN
Public Administration Program, Faculty of Social Science and Political Science, Universitas Bojonegoro, Indonesia, Email, esaseptian2@gmail.com
Corresponding Author

Septi WULANDARI
Public Administration Program, Faculty of Social Science and Political Science, Universitas Bojonegoro, Indonesia, Email, septiwuland99@gmail.com

Didik Gunawan SUHARTO
Public Administration Program, Faculty of Social and Political Science, Universitas Sebelas Maret, Indonesia, Email, didikgusuharto@staff.uns.ac.id

Askar GARAD
Faculty of Managerial and Financial Science, University of Sileba Region, Yemen, Email, E-mail, askar2005.55@gmail.com

This research aims to analyze the collaboration strategy of Open Government-through collaboration, transparency, and participation-in sustainable tourism governance. The research method used a qualitative research design with a case study approach, selecting informants purposively from the Culture and Tourism office, local tourism stakeholders, and community members. Data were collected through in-depth interviews and observations, which were then analyzed using thematic analysis. The results showed that the communication can improve collaboration and transparency in improving the tourism sector, strengthening relationships with local communities. This research highlights the importance of the Pentahelix collaboration model, which integrates government, academia, business, community and media to drive sustainable tourism governance. The implications of the research suggest that improved coordination and active engagement of all stakeholders are essential to improve tourism sustainability. Strengthening communication channels and ensuring greater community participation in decision-making are crucial to achieving long-term development goals. This research contributes to the understanding of how Open Government principles can be applied in tourism governance and provides new insights into stakeholder collaboration, transparency, and community engagement in improving the sustainability of tourism destinations.

Keywords: Open government; collaboration; sustainable tourism governance

How to cite this article: Septian, E., Walandari, S., Suharto, D.G. & Garad, A. (2025). Open Government Collaboration Strategies for Sustainable Tourism Governance. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 14(4), 745-754. DOI: 10.21831/ajhtl.v14i4.123456

24°C Berawan 10:58 PM 2/23/2026

SINTA | Author Dashboard Kotak Masuk (979) - esaseptian

sinta.kemdiknasaintek.go.id/profile/scopus

SINTA Executive

Dashboard

Explore SINTA

Mutation History

List Verificator PT

My SINTA

ESa SEPTIAN
Sinta ID : 6852598

PUBLICATION

Scopus

Reset Document Req. Synchronization

Search...

Filter Quartile

Sort By

Year

Page 1 of 1 | Total Records : 5

Q2

Open Government Collaboration Strategies for Sustainable Tourism Governance

Journal publish at 2025

0 cited

Creator : Septian E.

African Journal of Hospitality Tourism and Leisure

24°C Berawan 10:55 PM 2/23/2026